BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan dari manajemen aset terpisah, serta pendapatan sah lainnya yang diterima oleh daerah tanpa bantuan dari luar, berdasarkan kemampuan dan kewenangan daerah sendiri. PAD digunakan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan otonomi daerah, menurut UU RI No 33 Th 2004, yang mengatur bagaimana anggaran pemerintah daerah serta pusat berkorelasi. Ini memungkinkan daerah menjadi lebih mandiri dalam hal pembiayaan. Dengan demikian, PAD memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri secara ekonomi, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun, terdapat kesulitan dalam beberapa daerah untuk menyeimbangkan jumlah PAD, yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Perbedaan potensi antar daerah adalah salah satu penyebab ketidakseimbangan ini (Oktiani, 2021). PAD dipengaruhi oleh beberapa komponen, Termasuk di dalamnya PDRB, inflasi, jumlah penduduk, pengeluaran daerah, dan jumlah pengunjung, pengeluaran pemerintah, belanja modal, investasi, dan tingkat pendidikan.

Investasi adalah salah satu aspek yang mempengaruhi PAD. Investasi berperan sebagai komponen penting untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal. Investasi yang tepat sasaran dapat memunculkan lebih banyak peluang kerja, Peningkatan produksi dan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Ciri khas daerah otonom adalah kemampuan keuangan daerah untuk mengelola kekayaan secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Ini terjadi karena investasi bisa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengeksplorasi potensi dan sumber daya yang dapat menghasilkan pendapatan daerah, sehingga investasi yang tersedia dapat dimaksimalkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Hal ini akan memberikan efek berganda Seperti meningkatkan efisiensi, mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. Data ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah investasi yang ditanamkan, PAD akan meningkat. Investasi memiliki potensi positif ketika investasi yang tepat secara langsung berkontribusi pada peningkatan PAD.

Meningkatkan pendapatan daerah dipengaruhi dengan cukup signifikan oleh sumber daya manusia. Hasil dari studi empiris menunjukkan bahwa mengadopsi teknologi dari negara maju akan memungkinkan negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk berkembang lebih cepat. Namun, penyebaran teknologi membutuhkan Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menggunakan peralatan tersebut. Tingkat pendidikan yang tinggi diperlukan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berbakat dan produktif.

Jika pendidikan rendah di daerah, akan ada kurangnya tenaga kerja yang berkualitas, yang mengakibatkan pengangguran yang lebih tinggi. Sumber utama kemiskinan dan keresahan sosial adalah peningkatan pengangguran, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan peningkatan beban masyarakat. Ini akan mencegah pertumbuhan ekonomi yang makin cepat pada waktu yang makin lama. Maka, meningkatkan tingkat pendidikan di suatu wilayah sangat penting guna mengoptimalkan mutu SDM, yang ketika akhirnya dapat mengoptimalkan PAD. Pendidikan juga memainkan kontribusi krusial mengenai mengoptimalkan kemakmuran sosial. telah menjadi fokus penting bagi pemerintah. Ini merupakan strategi untuk memperbaiki kondisi ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup penduduk secara keseluruhan. Ketika pendapatan meningkat, kemampuan membayar pajak kepada pemerintah daerah juga meningkat. Menurut Teori Modal Manusia, salah satu cara penting untuk meningkatkan PAD dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah meningkatkan tingkat pendidikan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, PAD dapat ditingkatkan dan pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan.

Belanja daerah mengandung semua anggaran untuk pemerintah daerah. Peraturan Nomor 13 Th 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan bahwa pengeluaran daerah terbagi jadi dua kategori: belanja tidak

langsung serta langsung: Belanja langsung mencakup pengeluaran yang langsung terkait dengan kegiatan dan program, seperti biaya untuk pegawai, jasa juga barang, subsidi, bunga, serta subsidi keuangan. Biaya tidak langsung, di sisi lain, mencakup biaya yang tak secara langsung melalui realisasi aktivitas juga program, seperti biaya tak terduga, biaya subsidi, pegawai, hibah, dan subsidi keuangan. Berlandaskan PP No 71 Th 2010 terekait standar akuntansi pemerintah guna laporan keuangan, belanja modal, pengeluaran tak terduga, pengeluaran operasi (pegawai, bunga, barang, subsidi, dan bantuan sosial), dan biaya tidak langsung. Permintaan untuk mengubah struktur belanja semakin meningkat, terutama di wilayah yang tidak memiliki banyak uang. Kapasitas fiskal yang rendah biasanya menyebabkan tekanan fiskal yang tinggi; sebagai akibatnya, perlu mengalokasikan bagian belanja yang lebih besar pada bidang-bidang yang menghasilkan lebih banyak uang untuk mengoptimalkan potensi pendapatan mereka.

Perubahan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan PAD karena mencerminkan peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi di suatu wilayah. Hal ini berdampak pada naiknya penerimaan dari pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatan PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi memperluas basis penerimaan PAD melalui aktivitas usaha, perdagangan, dan partisipasi swasta. Namun, hubungan ini dapat terhambat oleh ketimpangan wilayah, rendahnya efisiensi tata kelola pendapatan dan pemanfaatan sumber daya yang kurang optimal. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi penguatan kapasitas fiskal daerah untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan.

Tabel 1.1 PAD, Investasi, Tingkat Pendidikan , Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

TAHUN	INVESTASI (JUTA RUPIAH)	TINGKAT PENDIDIKAN (TAHUN)	BELANJA DAERAH (JUTA RUPIAH)	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	PAD (JUTA RUPIAH)
2018	3.128.225.750	8,23	4.869.536.536	4,69	1.656.569.597
2019	4.437.380.200	8,45	5.244.689.781	4,34	1.651.089.944
2020	3.511.677.200	8,55	4.820.947.802	-0,51	1.535.183.487
2021	6.204.193.900	8,60	4.388.299.688	3,7	1.834.431.187
2022	8.882.569.200	8,68	4.772.689.354	5,12	2.163.585.920
2023	10.404.989.400	8,81	5.501.683.606	4,66	2.259.688.736

Sumber: Badan Pusat Statistic, 2024

Kenaikan investasi, tingkat pendidikan, PDRB, belanja daerah, serta PAD Provinsi Jambi di tahun 2023 disebabkan oleh perbaikan program pemerintah untuk menarik investasi, peningkatan alokasi anggaran pendidikan, pembangunan infrastruktur, optimalisasi pajak dan retribusi, dan pertumbuhan sektor utama seperti pertanian, perkebunan, dan industri, didukung oleh peningkatan stabilitas moneter dan lingkungan investasi yang makin baik.

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa PAD Provinsi Jambi berubah setiap tahun, pada tahun 2019 PAD Provinsi Jambi terjadi penurunan semenjak tahun 2018 yaitu dari Rp 1.656.569.597 triliun rupiah menjadi Rp 1.651.089.944 triliun rupiah. Lalu di tahun 2020 terjadi penurunan lagi menjadi Rp 1.535.183.487 triliun rupiah, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp 1.834.431.187 triliun rupiah, terjadi kenaikan lagi pada tahun 2022 menjadi Rp 2.163.585.920 triliun rupiah, Pendapatan asli daerah Provinsi Jambi pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 karena realisasi pajak daerah melebihi target yang ditetapkan, serta kontribusi dari retribusi dan pendapatan lainnya yang juga menunjukkan peningkatan signifikan. Selanjutnya kembali terjadi kenaikan sebesar Rp 2.259.688.736 triliun rupiah pada tahun 2023, Kenaikan PAD di Provinsi Jambi pada tahun 2023 disebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak daerah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

Investasi Provinsi Jambi pada tahun 2019 mencapai Rp 4.437.380.200 triliun rupiah, tetapi turun menjadi Rp 3.511.677.200 triliun rupiah pada tahun 2020. Pada tahun 2021 investasi terjadi kenaikan sebesar Rp 6.204.193.900 triliun rupiah, terjadi kenaikan lagi menjadi Rp 8.882.569.200 triliun rupiah di tahun 2022. Lalu di tahun 2023, investasi kembali meningkat menjadi Rp 10.404.989.400 triliun rupiah, kenaikan investasi Penanaman Modal Dalam

Negeri di Provinsi Jambi di tahun 2023 disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi kepada perusahaan yang telah membantu mencapai target investasi. Selain itu, inovasi layanan masyarakat yang unggul oleh DPMPTSP juga berkontribusi pada peningkatan investasi. Pemerintah Jambi juga berhasil merealisasikan capaian investasi melebihi target yang menunjukkan kinerja yang baik terkait menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan juga inklusif.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwasanya tingkat pendidikan di provinsi Jambi meningkat setiap tahunnya, berdasarkan rata-rata lama sekolah. Namun, jenjang pendidikan paling tinggi di Jambi hanyalah SMP, dengan durasi rata-rata 8,81 tahun. Namun, dalam jangka panjang, meningkatkan sektor pendidikan Provinsi Jambi akan mengoptimalkan mutu SDM serta pendapatan daerah.

Belanja daerah Provinsi Jambi terjadi penurunan yang signifikan dari 2019 hingga 2020 dari Rp 5.244.689.781 triliun rupiah menjadi Rp 4.820.947.802 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi sebesar Rp 4.388.299.688 triliun rupiah. Terlepas dari kenaikan sebesar 4.772.689.354 triliun rupiah pada tahun 2022, kenaikan berikutnya terjadi pada tahun 2023 sebesar 5.501.683.606 triliun rupiah. Kenaikan belanja daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta penyesuaian belanja untuk program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tabel 1.1 mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun 2018 dari 4,69 persen menjadi 4,34 persen, di tahun 2020 terjadi kemunduran jadi -0,51persen. Selanjutnya terjadi kenaikan menjadi 3,7 persen di tahun 2021, kemudian terjadi kenaikan di tahun 2022 yaitu sebesar 5,12 persen dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2023 sebesar 4,66 persen. Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi sebesar 4,66% pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor. Utamanya, penurunan kinerja penerimaan pajak dan bukan pajak

yang signifikan, serta rendahnya daya saing produk lokal. Selain itu, ketidakpastian regulasi dan pelayanan publik yang kurang optimal juga berkontribusi terhadap iklim investasi yang tidak mendukung. Sektor-sektor utama seperti pertanian dan pertambangan mengalami tekanan, yang mengakibatkan penurunan output ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian berjudul "Pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi" memiliki perbedaan utama dengan skripsi sebelumnya dalam hal fokus dan variabel yang dianalisis. Skripsi ini secara eksplisit mempertimbangkan empat variabel: investasi, tingkat pendidikan, belanja daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi, untuk menentukan dampaknya kepada PAD di Provinsi Jambi.

Dari penjelasan tersebut, peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang variabel yang berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi. Oleh sebab itu, peneliti sangat berminat guna melaksanakan studi yang berjudul "Pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Investasi, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi tahun 2000-2023?
2. Bagaimana pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi tahun 2000-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis serta mengetahui pengembangan Investasi, Belanja Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi tahun 2000-2023
2. Tujuan dari studi ini ialah guna menganalisis serta menemukan dampak Investasi, Tingkat Pendidikan, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi kepada PAD Di Provinsi Jambi tahun 2000-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Studi ini bisa menguntungkan pendidikan secara langsung ataupun tak langsung. Berikut beberapa keuntungan yang dapat didapat dari studi ini:

1. Manfaat Akademis

Dalam hal akademis, penelitian ini berguna untuk mendapatkan lebih banyak data, memperluas pemahaman, dan memperdalam teori yang telah dikembangkan tentang Investasi, Tingkat Pendidikan, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan PAD.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, studi ini berharap bisa memberikan wawasan yang jelas dan berfungsi sebagai referensi untuk pertimbangan dan pedoman yang berhubungan dengan pengendalian investasi, PAD, tingkat pendidikan belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan APBD.